



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansai Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024.

Adapun pembuatan LAKIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pamerintah dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Lapoan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintahan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman memberikan gambaran tentang tolok ukur pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaien Padang Pariaman dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam menyusun Lakip ini kami telah berupaya secara maksimal namun dirasa masih ada kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan laporan di masa datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pikak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, semoga laporan ini bermanfaat hendaknya.

Limpato, 02 Januari 2025

PIK KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



EL ABDES MARSYAM,ST,MM

NIP. 19701219 1998031004



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana	1
B. Permasalahan Utama (Statgis Issued) Penanggulanagn Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman.....	5
C. Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	8
A. Rencana Strategis.....	9
1. Visi.....	9
2. Misi.....	10
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.....	12
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	14
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024.....	14
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	16
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah	17
4. Perbandingan Realisasi Tahun Ini degan Target da Realisasi Provnsi Sumatera Barat.....	18
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	23
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	26
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP.....	35
A. Kesimpulan	35
A. Langkah Ke Depan.....	36



BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan OPD di Lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 18 Tahun 2009 Tanggal 24 November 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Daerah (SOTK) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diperbaharui melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011 dan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara ex officio dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugasnya.

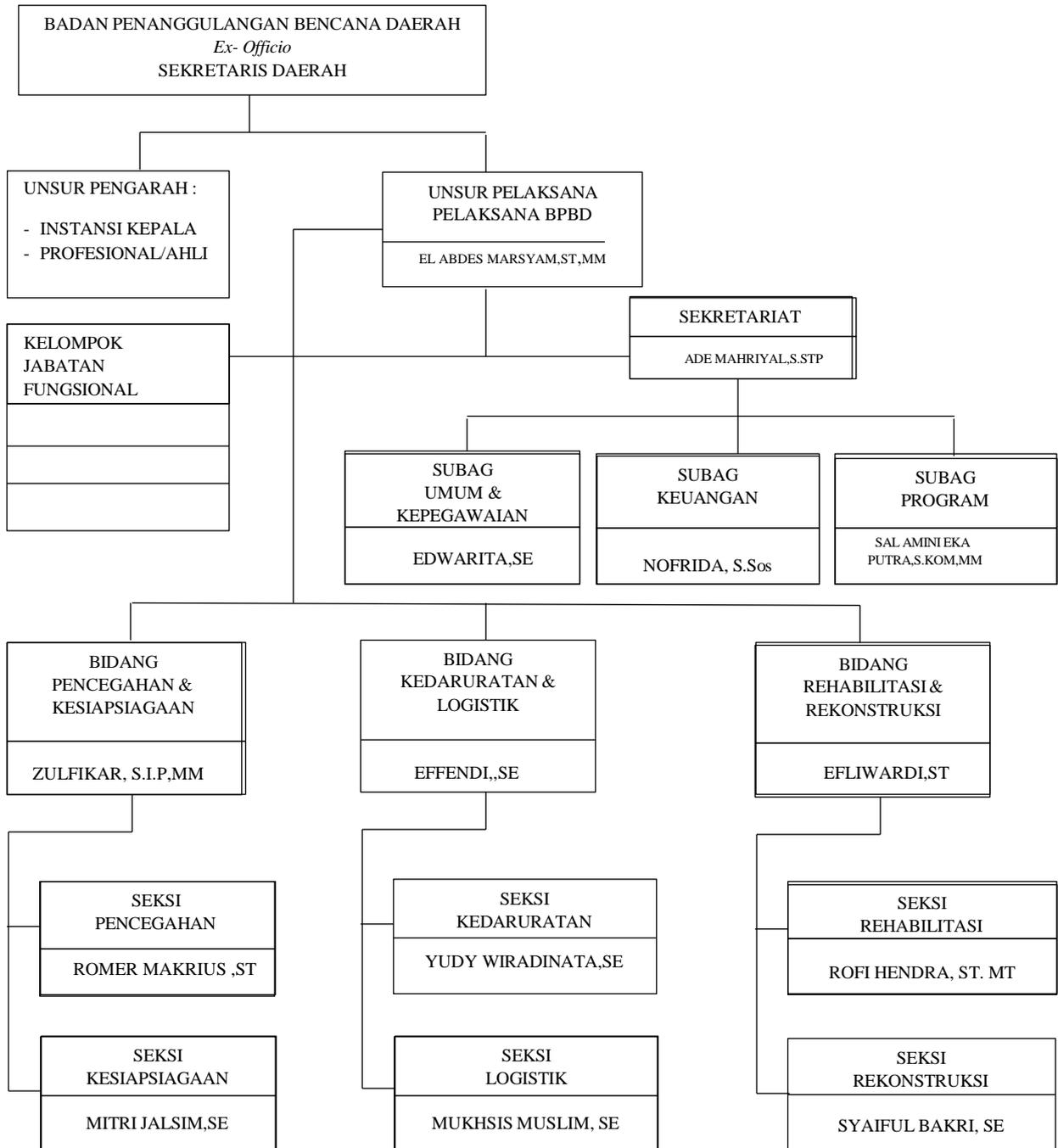
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinyas elain didukung oleh tiga bidang dan satu sekretariat.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA





**STRUKTUR JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
MENURUT ESELONERING**

No.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1	Kepala	V			
2	Sekretaris		V		
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		V		
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		V		
5.	Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekontruksi		V		
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			V	
7.	Kasubag Keuangan			V	
8.	Kasubag Program			V	
9.	Kasi Pencegahan			V	
10	Kasi Kesiapsiagaan			V	
11.	Kasi Kedaruratan			V	
12.	Kasi Logistik			V	
13.	Kasi Rehabilitasi			V	
14.	Kasi Rekontruksi			V	
15	Staf				16

Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dikerangkakan dengan diwujudkannya good governance melalui peningkatan pelayanan publik dan kualitas SDM oleh segenap jajaran manajemen dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



Dengan demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman memaklumkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan secara harmonis mewujudkan visi Kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana.

Makna visi tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah turut membantu mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintah yang diembannya, untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman Siaga, Tanggap dan Tangguh dalam menghadapi bencana di Padang Pariaman.

Pernyataan Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebagai berikut:

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah rawan bencana, dimana terdapat 13 jenis bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam upaya mengoptimalkan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Padang



Pariaman serta Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Isu strategis BPBD yaitu :

1. Kabupaten Padang Pariaman berada pada zona rawan bencana.
2. Jumlah bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, misalnya banjir, longsor dan angin puting beliung.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana yang belum memadai.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Menyajikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Padang Pariaman tahun 2021-2026 yang di resmikan pada tanggal 24 Agustus 2021, Melalui Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode 2021-2026 Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2024. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Target-target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis BPBD Padang Pariaman disusun berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran strategis dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BPBD Padang Pariaman yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Visi

Setelah tanggal 24 Agustus 2021 diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 adalah



“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Unggul BERkelanjutan** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Religius** : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- SeJAhtera** : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sector ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- BerbudayaYA** : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 terdapat 7 buah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.



4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Pada Misi tersebut BPBD Padang Pariaman mengacu kepada misi ke enam. BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2024

Adapun tujuan dan sasaran strategis OPD BPBD Kab. Padang Pariaman yang tertuang pada Renstra BPBD Kab. Padang Pariaman Periode 2021-2026. Adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi : Padang Pariaman Berjaya				
Misi Ke 5 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif bersih, berkeadilan,demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional aspiratif, partisipatif dan transparan.				



1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten Yang dikeluarkan Oleh Kemenpan RB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat
Misi Ke 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat				
1	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
			Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase sektor perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 termasuk untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 4 sasaran strategis dan 5 indikator maka dipilihlah 2 sasaran strategis dan 2 indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) di BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan.



Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten Yang dikeluarkan Oleh Kemenpan RB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	A
2	Penguatan Layanan Kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
			Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
			Meningkatnya pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	80%

26/6/20 7 20/6.25 A 20/6.25 7

Kabag. DPMPTSP
[Signature]



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (BPBD) telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam evaluasi tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBD Tahun 2024 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja pada Tujuan di BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Capaian target dan realisasi kinerja tahun 2024 :

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki beberapa sasaran strategis adapun capaian Kinerja BPBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPBD th. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	Nilai	A	A	A	Berhasil
2	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	119	119%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100%	Berhasil
4	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase sektor perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	Persen	80	100	125%	Sangat Berhasil

Berdasarkan Renstra Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran strategis Meningkatkan pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan dan Meningkatkan pelayanan penanganan

dalam keadaan darurat bencana indikator sasaran strategis tersebut kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai BPBD

Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya, yaitu:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap.
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
---	---

Pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, memiliki sebuah indikator yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat, adapun capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2024

Tabel 3.2 Capaian Kinerja BPBD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	Nilai	A	A	A	Berhasil

Pada indikator strategis pertama yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat telah berhasil mencapai target yang

diinginkan, pada tahun 2024 BPBD Kabupaten Padang Pariaman berhasil mendapatkan nilai SAKIP A hasil dari penilaian Inspektorat.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis pertama pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3 Capaian Kinerja BPBD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	A	A	A	100%	Berhasil

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kierja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat realisasi pada tahun 2023 tercapai hasil yaitu nilai A, dan pada tahun 2024 nHasil Penilaian Evaluasi SAKIP BPBD adalah A.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah

Perbandingan anatara realisasi pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada sasaran strategis pertama BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja BPBD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah					Interpretasi	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat		B	BB	BB	A	A	A	AA	BB	A	A	A	-	-	Berhasil

Pada kondisi awal Renstra 2021-2026 yaitu pada tahun 2021 Pada indikator sasaran strategis pertama Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat ditargetkan nilai yang Sakip BB sedaangakan pada akhir periode (tahun 2026) ditargetkan nilai Sakip yang didapatkan adalah AA. Dari hasil capaian didapat pada tahun 2022 hingga tahun 2024 BPBD telah berhasil mendapatkan nilai SAKIP yaitu A.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BPBD telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan dengan meningkatkan nilai SAKIP BPBD Kab. Padang Pariaman. Adapun Indikator Pada sasaran pertama ini adalah Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat.

Nilai SAKIP BPBD hasil dari evaluasi Inspektorat pada Tahun 2023 mendapatkan nilai A dan untuk nilai SAKIP BPBD Tahun 2024 mendapatkan nilai A. artinya dengan capaian ini untuk nilai SAKIP BPBD Pada Tahun 2024 dapat dinyatakan sangat berhasil.

Dalam upaya meningkatkan hasil penilaian SAKIP BPBD Kabupaten Padang

Pariaman melakukan beberapa hal dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan BPBD.

Berhasilnya pencapaian target indikator ini pada tahun 2024 ikut dipengaruhi oleh:

- Sudah terstrukturnya penyusunan laporan evaluasi kinerja yang dilaporkan.
- Sudah sesuaiya dokumen-dokumen pendukung yang dibuat.
- Sudah lebih terarah dan berbasis kinerja program kegiatan yang dilaksanakan.
- Digunakannya aplikasi SIMAK Kinerja dalam pengumpulan data kinerja BPBD dan dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Melaksanakan rapat evaluasi internal yang dilaksanakan selalu ditindaklanjuti secara berjenjang agar tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja
- Dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum dapat terukur dengan baik.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal

e. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sebuah indikator yaitu Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat. Dalam upaya meningkatkan hasil penilaian Evaluasi SAKIP BPBD Kab. Padang Pariaman didukung oleh program Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan pendukung dalam pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam kegiatan ini terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
 - Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen Renja 2024, Renja Perubahan

2024, RKA 2025, RKAP 2024, DPA 2024, dan Perubahan DPA 2024 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan Laporan LPPD Tahun 2023, LAKIP 2023 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran di bagian Sekretariat, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 96,95 = 3,05\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga

didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 3,05 = 3,05\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 sebesar **3,05 %**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat	100%	96,95%	3,05%



Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan terdapat sebuah indikator yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Adapun capaian kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	101%	100%	119 %	119%	Sangat Berhasil

Dalam realisasinya pada tahun 2024, pada sasaran pertama BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil mencapai 119 % warga negara yang telah menerima layanan pecegahan dan kesiapsiagaan.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	101%	100%	119 %	119%	Sangat Berhasil

Pada tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2023 capaian kinerja pada indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 101% dan pada tahun 2024 sebesar 119%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPBD Pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Interpretasi
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	45	50	55	100	65	70	3,86	55,87	101	119	0	0	Sangat Berhasil

Dimana pada sasaran Meningkatkan pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 45% dan tahun 2026 ditargetkan sebanyak 70%. Pada tahun 2023 capaiannya hanya sampai pada 101% dari seluruh penduduk namun pada tahun 2024 BPBD Kab. Padang Pariaman berhasil memberikan layanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan sebanyak 119% dari seluruh masyarakat di kabupaten padang Pariaman.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Adapun indikator yang ingin dicapai dari sasaran tersebut adalah Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Persentase dari indikator didapatkan dari hasil pembagian jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi dengan jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana yang kemudian dikalikan dengan 100%

Tabel 3.7. Perbandingan antara target dan capaian jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Target Warga Negara yang Berada di Kawasan Bencana Prioritas (Jiwa)	Capaian Warga Negara yang Mendapatkan Layanan (Jiwa)	Persentase (%)
380.115	451.045	119%

Pada tahun 2024 didapatkan capaian sebesar 119 % hasil dari perhitungan 451.045 warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi dengan 380.115 jiwa warga negara yang berada di kawasan rawan bencana Prioritas BPBD Kabupaten Padang Pariaman (Banjir Bandang, Banjir, Longsor, Tsunami).

Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan untuk tahun 2024 sebesar 100%, maka dapat dikatakan capaian realisasi BPBD Kab. Padang Pariaman dapat dikatakan berhasil dan telah melebihi target yang telah ditentukan sebesar 119%.

Keberhasilan capaian tersebut dapat terlaksana akibat beberapa layanan yang

telah dilakukan oleh BPBD dalam upaya meningkatkan warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Adapun beberapa layanan tersebut adalah:

- a. Penguohan Masyarakat Siaga Tsunami Berstandar UNESCO
- b. Sosialisasi dan Simulasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami dan Banjir di Sekolah – Sekolah dan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 3.1. Sosialisasi dan Simulasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sekolah

- c. Sosialisasi dan pelatihan mitigasi kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam kegiatan Destana Program IDRIP.



Gambar 3.2. kegiatan membangun ketangguhan keluarga dalam menghadapi bencana melalui program keluarga tanggun bencana (KATAN BANA)

- d. Penyusunan Draft Nol Rencana Kontigensi (Renkon) dan Finalisasi Dokumen Renkon Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Padang Pariaman.
- e. Kegiatan Susur Jalur di Nagari bersama BNPB dalam Program BNPB
- f. Penyampaian informasi melalui media elektronik dan media cetak





Gambar 3.3. Sosialisasi melalui berbagai media.

- g. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi, titik kumpul dan papan informasi publik.
- h. Layanan pusdalops diantaranya call center yang dapat dihubungi selama 24 jam, layanan pendataan bencana dan korban bencana dan layanan informasi kebencanaan di grup media sosial.
- i. Serta layanan pemberian peralatan perlindungan dan bantuan logistik kepada korban bencana.





Gambar 3.4 Pemberian bantuan peralatan perlindungan dan logistik.

Dalam mewujudkan indikator kinerja utama tersebut dimanfaatkan sumber dana dari APBD Kabupaten Padang Pariaman dan World Bank untuk program IDRIP. Selain tersedianya anggaran untuk dapat mencapai IKU tersebut juga terdapat beberapa faktor pendukung lainnya yaitu dukungan dari instansi terkait baik dalam melakukan sosialisasi secara langsung tatap muka maupun melalui berbagai media lainnya, adapu instansi yang terlibat diantaranya BNPB, PT.Miskat Alam, World Bank, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan P3A, Bapelitbangda, Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari, TNI dan POLRI.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target dari sasaran ini terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah:

1. Untuk saat ini penyampaian informasi sebagian besar dilakukan melalui media sosial.
2. Kurangnya tenaga ahli dalam pembuatan pamflet informasi bencana.
3. Kurangnya anggaran yang dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Luasnya wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang berada di kawasan rawan bencana
5. Masih banyak nagari yang belum peduli terhadap penanggulangan bencana

e. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program, kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung tercapainya target indikator sasaran strategis pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Pada sasaran strategis Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan terdapat sebuah indikator sebagai berikut:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Adapun Program yang mendukung capaian target indikator tersebut adalah Program penanggulangan bencana dengan kegiatan dan sub kegiatannya adalah:

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Dalam kegiatan ini terdapat satu subkegiatan yang menunjang tercapainya realisasi indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. yaitu

i. Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

1. Pada sub kegiatan dilakuan pemebrian infomasi kepada masyarakat baik melalui media sosial (Facebook dan Instagram) maupun melalui media cetak seperti Koran, Spanduk, Pamflet, dan Banner.
2. Pada Sub Kegiatan ini dilakukan penyampain informasi melalui

tatap muka ketika sosialisasi dilakukan.

3. Di Sub kegiatan ini juga dilakukan pengadaan rambu-rambu informasi kebencanaan yang dipasang di daerah rawan bencana. Adapun daerah yang sudah terpasang rambu-rambu kebencanaan adalah : Nagari Manggopoh Palak Gadang, Nagari Ulakan, Nagari Katapiang, Nagari Kuranji Hilir, Nagari Pilubang dan Nagari Malai V Suku.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiagsiagaan Terhadap Bencana

Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan menunjang tercapainya indikator kinerja tersebut diantaranya yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

1. Pada sub kegiatan ini dilakukan peningkatan kapasitas bagi Masyarakat di daerah rawan bencana. Dimana semua kegiatan ini dilakukan pada Program IDRIP BNPB dengan bantuan World Bank
2. Dalam Peningkatan kapasitas Destana melalui program IDRIP ini dilakukan berbagai kegiatan diantaranya yaitu :
 1. Sosialisasi Dinagari
Sosialisasi adalah proses memperkenalkan masyarakat pada norma dan adat istiadat social. Proses ini membantu individu berfungsi baik dalam masyarakat.
 2. Pengumpulan Data Penilaian Ketangguhan Desa
Pengumpulan data PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) bertujuan untuk memetakan kondisi dan gambaran awal mengenai tingkat risiko, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas desa dalam menghadapi ancaman tsunami sebagai data dasar (baseline) tingkat ketangguhan bencana desa.
 3. Verifikasi Penilaian Ketangguhan Desa
Verifikasi penilaian dari data PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) suatu nagari yang telah dikumpulkan.

4. FGD Penilaian Ketangguhan Desa
5. Pengenalan Penanggulangan Bencana
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, forum/lembaga yang sudah didesa/nagari terkait dengan kegiatan destana dan pengenalan mengenai dasar penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.
6. Persiapan Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana
FPRB desa/kelurahan merupakan suatu wadah atau mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama para pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan.

Keanggotaan FPRB desa/kelurahan harus memperhatikan partisipasi/keterwakilan dari berbagai organisasi/lembaga didesa/kelurahan meliputi : pemerintah desa/kelurahan, lembaga usaha, organisasi masyarakat, kelompok profesi, kategori-kategori lain, termasuk kelompok difabel, kelompok perempuan dan perwakilan dari wilayah.
7. Penguatan Forum PRB Dan Relawan
Tim relawan desa/kelurahan merupakan wadah yang menaungi individu-individu yang secara sukarela dan siap sedia melaksanakan pengurangan risiko bencana baik dalam kondisi pra bencana, respon darurat dan pasca bencana.
8. Persiapan Penyusunan Peta Resiko
Persiapan penyusunan peta resiko desa dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan aktif dari masyarakat.
9. Penyusunan Peta Resiko Bencana
Penyusunan peta resiko desa dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan aktif dari masyarakat. Masyarakat diberdayakan agar mampu mengenali potensi ancaman bencana, lokasi titik kumpul, lokasi bangunan strategis, dan tempat evakuasi sementara didesa/kelurahan.

10. Finalisasi Penyusunan Peta Resiko

Finalisasi penyusunan peta resiko bencana yang telah dilakukan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat selama proses penyusunan peta resiko bencana.

11. Persiapan Rencana Pembentukan Aksi Komunitas Rpb

Proses persiapan penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana dilakukan secara partisipatif.

12. Pembentukan Rencana Aksi Komunitas

Proses penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana (RAK-PRB) dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur pentahelix tingkat desa berdasarkan peta risiko bencana yang telah disusun. Dokumen ini berisikan rencana kegiatan – kegiatan prioritas desa/kelurahan dalam melaksanakan upaya – upaya PRB dalam jangka waktu tertentu.

13. Finalisasi Rencana Aksi Komunitas

Finalisasi RAK mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa/kelurahan. Agar keberlanjutan RAK PRB dapat terjamin, harus diintegrasikan menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangkat menengah desa (RPJMDes).

14. Persiapan Mitigasi Bencana

Persiapan mitigasi bencana dilakukan dengan mempersiapkan penyusunan SOP peringatan dini berbasis komunitas yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada masyarakat dalam merespon informasi peringatan dini bencana. Keluarga tangguh bencana yang memiliki pengetahuan risiko bencana, pengetahuan keadaan darurat bencana, akses informasi formal kebencanaan, pengetahuan lokasi dan rute jalur evakuasi di rumah dan dilingkungannya. Penyusunan dokumen rencana evakuasi dilaksanakan melalui peran aktif masyarakat untuk memastikan aksesibilitas jalur evakuasi serta dapat secara inklusif memenuhi

kebutuhan anggota masyarakat.

15. Pelaksanaan Mitigasi Bencana

Kebutuhan mitigasi bencana mengacu pada dokumen rencana aksi komunitas PRB yang telah disusun. Pelaksanaan mitigasi bencana structural didampingi oleh fasilitator sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan guna menjaga keberlanjutannya.

ii. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

1. Pada sub kegiatan ini dilakukannya sosialisasi Pelatihan dan Mitigasi bencana Pemuda Pancasila bersama BPBD Padang Pariaman, Sosialisasi Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Nagari Tapakih, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pramuka dalam Menghadapi Bencana, Peningkatan Sinergitas antar Relaan dalam Penanganan Darurat Bencana dan Sosialisasi Simulasi Bencana Gempa bumi

iii. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota

1. Pada sub kegiatan ini digunakan untuk pemberian informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui media elektronik.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya

pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 119$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 119 - 100 = 19\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 95,44 = 4,56\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 19 + 4,56 = 23,56\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 sebesar **23,56%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	119%	95,44%	23,56%



Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Tabel 3.8 Perbandingan target dan sasaran th. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100%	Berhasil

Sedangkan capaian pada sasaran kedua telah berhasil melebihi target dimana telah 100% korban bencana yang telah mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya Pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	100%	100%	100 %	100%	Berhasil

		dan evakuasi korban bencana				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

Sedangkan pada sasaran Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana pada tahun 2024 BPBD Kab. Padang Pariaman dapat memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 100% dari seluruh korban bencana yang ada pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Interpretasi
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	67	72	77	100	87	92	99,9	100	100	100	0	0	Berhasil

Untuk sasaran ketiga dengan indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditargetkan 67% yang mendapatkan layanan tersebut dan pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 92% korban bencana yang mendapatkan layanan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana dilakukan upaya-upaya yang dapat mencapai target pada indikator yang telah ditentukan, adapun indikator pada sasaran strategis ini adalah

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Persentase dari indikator tersebut didapatkan dari hasil pembagian jumlah warga negara korban bencana yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi dengan jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikalikan dengan 100% .

Tabel 3.11 Perbandingan antara target dan capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Target Jumlah Warga Negara Korban Bencana (Jiwa)	Capaian Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Layanan (Jiwa)	Persentase (%)
26.764	26.764	100%

Adapun yang dimasukkan ke dalam korban bencana adalah warga negara yang meninggal, hilang, sakit/luka, menderita/terdampak dan mengungsi akibat dari bencana. Pada tahun 2024 terdapat 26.764 jiwa warga negara yang menjadi korban bencana dari 329 kejadian bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk capaian pada tahun 2024 BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil melakukan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada seluruh korban bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% maka capaiannya sebesar 100%.

Adapun layanan yang BPBD Padang Pariaman dalam mencapai indikator

IKU tersebut adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara langsung dan secara tidak langsung. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan secara langsung dilakukan dengan menerjunkan langsung Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD ke lokasi bencana. Adapun contohnya seperti pencarian orang hilang, penyelamatan dan pengevakuasian korban bencana banjir, pembersihan pohon tumbang dan material longsor dan sebagainya. Penyelamatan secara langsung ini dilakukan jika korban bencana tidak dapat melakukan evakuasi secara mandiri.



Gambar 3.5 Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Sedangkan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan dengan cara penyampaian informasi kepada masyarakat yang berada di lokasi bencana untuk dapat melakukan evakuasi secara mandiri ke tempat lebih aman.

Adapun keberhasilan dalam capaian sasaran ini didukung oleh beberapa faktor pendukung seperti :

- a. Adanya dukungan anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
- b. Adanya dukungan Instansi terkait BNPB, World Bank, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan P3A, Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari, TNI, POLRI.
- c. Adanya dukungan dari pihak pemerintahan kecamatan, nagari dan masyarakat yang berada di lokasi kejadian bencana.
- d. Adanya dukungan dari pihak relawan kebencanaan dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Adanya dukungan sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai dalam upaya penanggulangan bencana.
- f. Adanya kemampuan dan kompetensi Tim Reaksi Cepat (TRC), Pusdalops, dan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target dari sasaran ini terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan SDM yang andal dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- b. Seringnya terjadi kerusakan kendaraan operasional lapangan
- c. Tidak akuratnya informasi dilapangan yang disampaikan masyarakat kepada BPBD Kabupaten Padang Pariaman
- d. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, seperti masih kurangnya uang kejadian yang tersedia.
- e. Ketersediaan logistik yang belum sebanding dengan luas wilayah dan potensi bencana

e. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program, kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung tercapainya target indikator sasaran strategis pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Pada sasaran strategis Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana terdapat sebuah indikator sebagai berikut:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Adapun Program yang mendukung capaian target indikator tersebut adalah Program penanggulangan bencana dengan kegiatan dan sub kegiatannya adalah:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan menunjang tercapainya indikator kinerja tersebut diantaranya yaitu:

a) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- Pada sub kegiatan ini dilakukan Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kepada korban bencana yang dilakukan oleh tim reaksi cepat (TRC).

2. Kegiatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pada kegiatan ini terdapat sebuah sub kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini yaitu :

a) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Saran dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

- Pada sub kegiatan ini digunakan untuk pemberian informasi terkait bencana dan rencana evakuasi korban bencana kepada masyarakat korban bencana. Kegiatan ini dilakukan oleh tim Pusdalops BPBD.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 89,31 = 10,69\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 10,69 = 10,69\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah tahun 2024 sebesar **10,69%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	89,31%	10,69%



Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Tabel 3.12 Perbandingan target dan sasaran th. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Inter-pestasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	Persen	80	100	125%	Sangat Berhasil

Pada indikator Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana nilai capaian

yang di dapatkan adalah 100% dari taget yang diinginkan pada tahun 2024 sebesar 80% sehingga persentase keberhasilan yang telah dicapai sebesar 125% dan dapat dinyatakan interprestasinya sebagai Sangat Berhasil.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2023 dan 2024 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		%	Inter-pestasi
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	66,66%	80%	100 %	125%	Sangat Berhasil

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi sasaran strategis pada jangka menengah BPBD dengan target jangka menengah tahun 2021 sampai 2026 pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Interpretasi
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas	Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	%	-	65	70	75	80	85	90	-	-	66,66	100	0	0	Berhasil

Pada indikator sasaran strategis keempat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 70%, dan pada akhir periode RPJMD tahun 2026 ditargetkan sebesar 90%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengatur dan menilai pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran strategis ini memiliki indikator **Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.**

Pada tahun 2023 BPBD Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan dana Hibah dari BNPB dalam upaya rekonstruksi tiga jenis infrastruktur di tiga tempat yang rusak akibat bencana dengan anggaran sebesar Rp. 29.592.026.000. Adapun tiga jenis infrastruktur tersebut yang dilakukan rekonstruksi adalah:

1. Rekonstruksi pembangunan dinding penahan tebing di Jalan Sikayan Ruas Jambak Lubuk Alung.
2. Rekonstruksi pembangunan jembatan pinjauan di Kecamatan Sungai Limau
3. Rekonstruksi pembangunan Bendung/Cekdam Sungai Limau.

Dari ketiga objek infrastruktur tersebut kemudian dijadikan sebagai target dalam pelaksanaan rekonstruksi pascabencana pada tahun 2023. Dua dari tiga objek tersebut telah dapat diselesaikan pada tahun 2023 dengan persentase terselesainya sebesar 100%, yaitu pada objek pembangunan dinding penahan tebing di Jalan Sikayan Ruas Jambak Lubuk Alung dan pada pembangunan jembatan pinjauan di Kecamatan Sungai Limau.

Sedangkan pada kegiatan Rekonstruksi pembangunan Bendung/Cekdam Sungai Limau mengalami sedikit kendala karena adanya pemutusan kontrak dengan kontraktor. Sehingga persentase penyelesaian pembangunan cekdam ini hanya sampai pada 38,6 %. Pembangunan cekdam ini selanjutnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2024 dengan melakukan lelang tender kembali.

Pada tahun 2024 Rekonstruksi pembangunan Bendung/Cekdam Sungai Limau berhasil diselesaikan dengan persentase terselesainya sebesar 100%

Adapun faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi tersebut adalah:

1. Lengkapya persyaratan administrasi dan dokumen yang disiapkan oleh kontraktor pelaksana rekonstruksi. Sehingga dapat memperlancar proses pencairan dana sesuai persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam bentuk MC (*monthly certificate*) dan dapat diproses dengan cepat.

2. Pengawasan teknis berjalan cukup baik antara kontraktor dan pengawas

Tabel 3.15. Perbandingan Anatra Target dan Realisasi Pelaksanaan rekonstruksi pascabencana pada sektor infrastruktur.

Target sektor infrastuktur yang mendapatkan penanganan rekonstruksi pascabencana Tahun 2024	Capaian sektor infrastuktur yang mendapatkan penanganan rekonstruksi pascabencana Tahun 2024	Persentase
1 Objek Infrastruktur	1 Objek Infrastruktur	100%

Dengan penjelasan tersebut didapatkan nilai sektor infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak satu jenis infstuktur dari target satu jenis infrastruktur yang harus diselesaikan pada tahun 2024 sehingga didapatkan nilai persentase sebesar 100% yang kemudian dijadikan nilai capaian dari indikator sasaran ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target dari sasaran ini terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah:

- a. Tidak lengkapnya berkas-berkas administrasi untuk kegiatan hibah
- b. Masih kurangnya uang operasional untuk menjalankan kegiatan monitoring ke pekerjaan hibah, dimana dana operasional tidak sesuai dengan kegiatan yang harus dilakukan ke lapangan. Misalkan minimal dalam seminggu seharusnya dilakukan pengawasan ke lapangan sebanyak tiga atau dua kali monitoring evaluasi dan satu kali rapat mingguan, namun harus dikurangi karena keterbatasan anggaran
- c. Target output tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran karena ketidakcukupan anggaran 2024

e. Analisis Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada sasaran strategis Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi

Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas sebuah indikator sebagai berikut:

1. Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.

Adapun Program yang mendukung capaian target indikator tersebut adalah Program penanggulangan bencana dengan kegiatan dan sub kegiatannya adalah:

1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan menunjang tercapainya indikator kinerja tersebut diantaranya yaitu:

a) Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Pada sub kegiatan ini dilakukan kegiatan rekonstruksi tiga jenis objek infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana yang anggarannya merupakan hibah dari BNPB.
- Pada sub kegiatan ini juga dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya yaitu:
 - **Screening** atau penyaringan terhadap sektor yang terdampak bencana.
 - **Identifikasi kerusakan**, merupakan lanjutan dari kegiatan screening sebelumnya.
 - **Vervikasi lapangan**, merupakan pengecekan langsung dampak bencana di lokasi bencana.
 - **Koordinasi**, setelah didapatkan data dan hasil dari proses sebelumnya selanjutnya BPBD melakukan koordinasi terkait dampak bencana kepada beberapa OPD pengmpu terkait, seperti: Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan BPKD, Dinas social, dll. Terkait tindak lanjut

terhadap dampak bencana tersebut. Koordinasi juga dilakukan dengan BPBD Provinsi dan BNPB Pusat.

- Selain itu apabila permasalahan dampak bencana tidak mampu diselesaikan menggunakan APBD yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya akan melakukan penyusunan proposal untuk permohonan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada BNPB dengan melalui proses Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dari 5 sektor terdampak yaitu: Sektor Perumahan Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi Produktif, Sosial, dan Lintas Sektor

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu dan biaya) yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang maksimal.

Efisiensi terjadi jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

Terdapat dua jenis efisiensi yaitu efisiensi capaian kinerja dan efisiensi penyerapan anggaran. Dari kedua efisiensi tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total efisiensi.

Pada efisiensi kinerja didapatkan dari persentase capaian kinerja dikurangi dengan 100%. Dari hasil kinerja BPBD pada sasaran Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = 100$$

Dari capaian kinerja kemudian dikurangi 100%, sehingga didapatkan efisiensi capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = 100 - 100 = 0\%$$

Untuk efisiensi penyerapan anggaran didapatkan dari 100% dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran pada anggaran sub kegiatan yang menunjang sasaran ini, sehingga didapatkan efisiensi penyerapan anggaran:

$$\text{Efisiensi Penyerapan Anggaran} = 100 - 74,75 = 25,25\%$$

Dari kedua hasil capaian kinerja tersebut kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan total efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Total Efisiensi} = 0 + 25,25 = 25,25\%$$

Dari total efisiensi tersebut didapatkan efisiensi anggaran pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 sebesar **25,25%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara kualitas dan kuantitas	Persentase jumlah perumahan, permukiman, dan infrastruktur yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	100%	74,75	25,25%

2. Inovasi di BPBD Kabupaten Padang Pariaman

Pada tahun 2024 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki 16 buah inovasi sebagai berikut:

a) **NAN SIGAB**



Program Nagari Siaga dan Tanggap Bencana (NAN SIGAB) adalah pembentukan sebuah Nagari yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana;

b) **SI SIGAB**



Program Srikandi Siaga Tanggap Bencana ini melihat potensi perempuan yang memiliki naluri kuat untuk selalu melindungi keluarganya serta aktif dalam kelompok sosial sehingga perempuan dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan bencana di dalam keluarga.

c) **SIAP AMAN**



Program Sistem Aplikasi Perumahan Untuk Manajemen Bencana (SIAP AMAN) adalah sebuah inovasi yang melakukan penghimpunan kepada kondisi rumah atau bangunan yang berada di Kawasan yang rawan bencana dan disimpan dalam sebuah database aplikasi.

d) **PUSPA SADAR BANA**



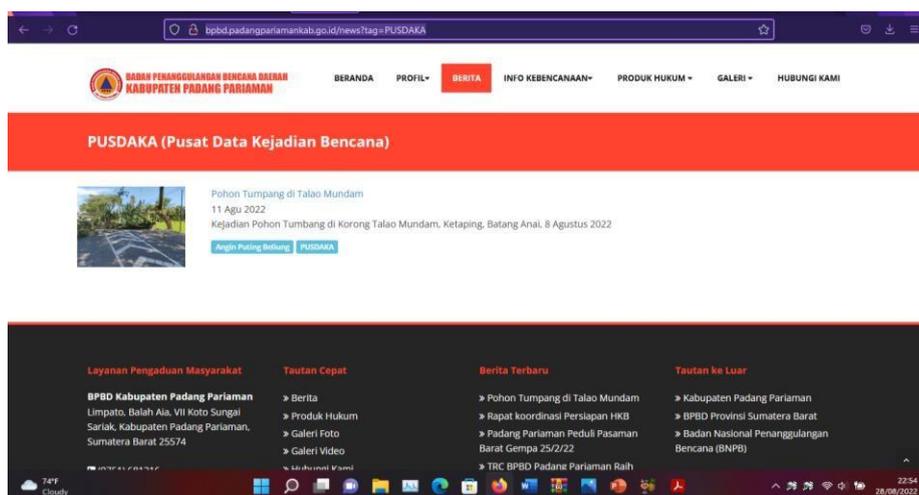
Inovasi PUSPA SADAR BANA (PUSAT PELAPORAN SIAGA DARURAT BENCANA) merupakan layanan pengaduan kebencanaan berbasis Call Center 112 dan layanan pengaduan melalui media sosial Whats App;

e) **SIMUNA V2**



Inovasi SIMUNA V2 (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BENCANA) Merupakan layanan informasi kebencanaan berbasis Android dan dapat di download melalui Paly Store;

f) **PUSDAKA**



Inovasi PUSDAKA (PUSAT DATA KEJADIAN BENCANA) Merupakan layanan informasi kejadian kebencanaan berbasis Website

g) **RENDA PENA**

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOMPLEK TK/SD UNGGULAN TERPADU LIMPATO KEC.VII KOTO SUNGAI SARIK TELP.(0751) 6812116 FAX (0751) 681216									
KARTU KENDALI PERALATAN KEBENCANAAN TAHUN 2022									
REGU: B (Petugas : Arsyad Efendi)		Tanggal	20 Des	Lokasi	Balah Aie Timur, SMP 3 Limpato, Nagari Limpato		Jam		
NO	DAFTAR PERALATAN KEBENCANAAN	Stok	Sisa	Satuan	JUMLAH BARANG		Kondisi		Keterangan
					Keluar	Masuk	Baik	Rusak	
1	Pelampung Orange (Biawak)	19		Buah					
2	Pelampung Biru	10		Buah					
3	Pelampung Atunas	11		Buah					
4	Pelampung Abu-Abu-Kuning	2		Buah					
5	Dayung	21		Buah					
6	Pompa Tangan Perahu	4		Buah					
7	Pompa Jarak Jauh	2		Buah					

Inovasi RENDA PENA (KARTU KENDALI PERALATAN KEBENCANAAN) merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan petugas Gudang, anggota TRC dalam penyediaan peralatan maupun logistic baik dalam keadaan darurat, maupun tidak darurat. Selain itu inovasi ini dapat memudahkan bagi Pimpinan dalam mengakses kualitas dan kuantitas peralatan hanya melalui gadget tanpa perlu meninjau ke Gudang peralatan dan logistic.

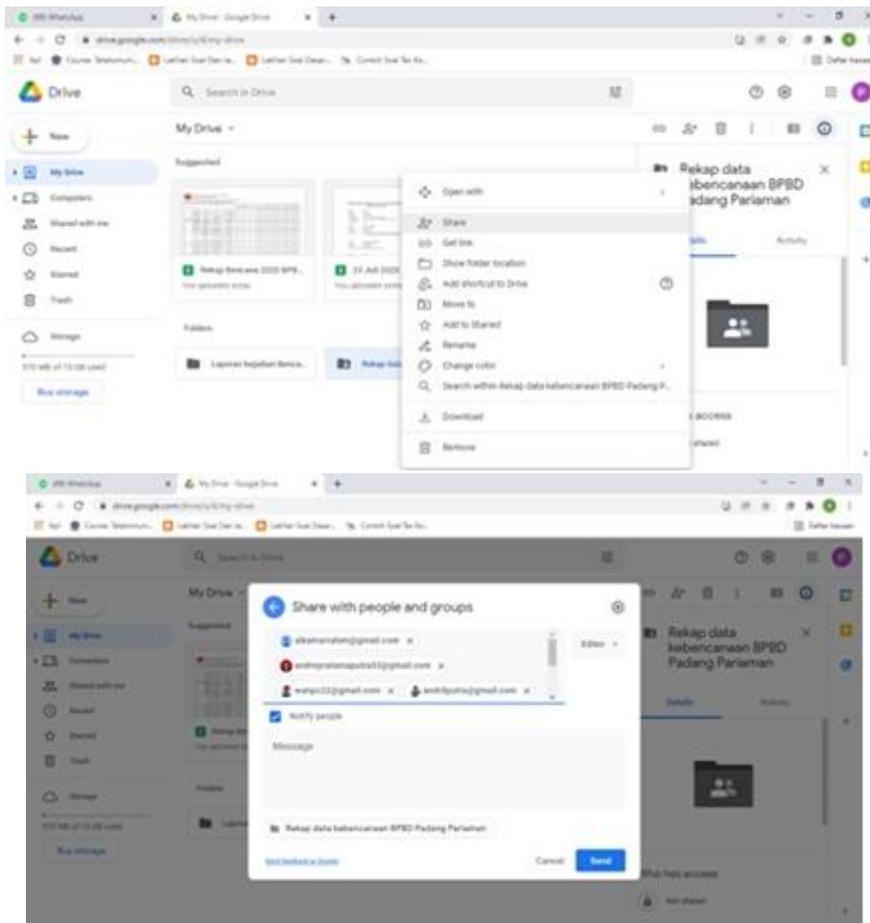
h) **PRINSIPAL R-3P**



Prinsipal R3P (Prinsipal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) merupakan suatu rangkaian kegiatan prosedur untuk mencapai tujuan oleh BPBD

Kab. Padang Pariaman kepada lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat nagari, kecamatan, maupun kabupaten. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dan non pemerintah dalam menentukan skala prioritas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

i) **DANA PAPA**



DANA PAPA (Digitalisasi Data Kebencanaan Padang Pariaman) yaitu sebuah digitalisasi data rekapan kebencanaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang mana data-data kebencanaan tersebut dicadangkan melalui *cloud storage* agar data lebih aman. *Cloud storage* adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Dengan melakukan pencadangan data ke *cloud storage*, kedepannya diharapkan data-data kebencanaan yang ada di Pusdalops-PB BPBD Padang Pariaman menjadi lebih aman dan lebih mudah diakses.

j) SITABA



SITABA (Siswa Tangguh Bencana) yaitu suatu kegiatan sosialisasi edukasi dan pelatihan mitigasi bencana secara masif terhadap seluruh komponen masyarakat terutama kaum rentan korban bencana. Pendekatan psikologis dan traumatis pasca bencana kegiatan dapur umum dan sebagainya. Eksistensi *Siswa Tangguh Bencana (SITABA)* dengan segala potensi, jejaring organisasi program dan aksi nyata mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada para siswa sebagai generasi penerus dalam penanggulangan bencana.

k) DOC



Program *Disaster Outing Class* (DOC) ini merupakan sebuah program sosialisasi berupa edukasi kebencanaan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di lingkungan Taman Kanak-Kanak terkhusus untuk murid. Dilakukan kepada murid karena murid merupakan bagian dari kaum rentan dari dampak bencana dan merupakan generasi penerus dalam pelaksanaan penanggulangan bencana ke depannya, sehingga nantinya diharapkan murid yang telah teredukasi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan khususnya untuk diri sendiri serta dapat membagikan ilmu dan pengalaman yang di dapatkan dari kegiatan tersebut kepada lingkungan keluarga dan masyarakat.

I) KATAN BANA



Program **KATAN BANA (Keluarga Tangguh Bencana)** pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program **KATAN BANA** ini merupakan sebuah program sosialisasi berupa edukasi kebencanaan kepada masyarakat terutama kepada keluarga yang merupakan dalam penanganan bencana.

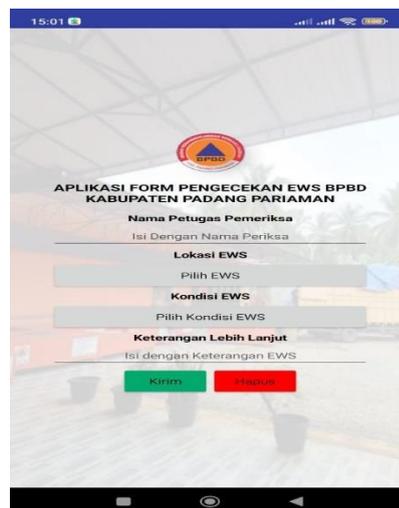
m) **DITA SIGAB**

ALAT KERJA SOSIALISASI DITA SIGAB



Program **DITA SIGAB** merupakan sebuah program yang berbentuk edukasi terkait mitigasi bencana berupa sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada kelompok disabilitas terutama untuk penyandang tuna rungu dan tuna wicara.

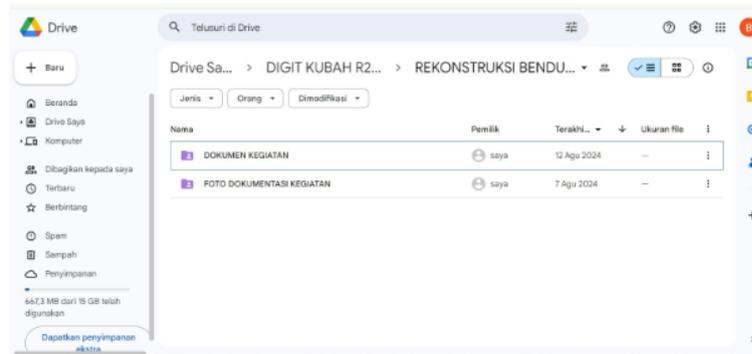
n) **APEL EWS**



Aplikasi APEL EWS tidak hanya memfasilitasi pengecekan perangkat secara online, juga dirancang untuk menyederhanakan system pelaporan dan pendataan perangkat peringatan dini tsunami kepada pimpinan dan tim mengenai kondisi perangkat EWS terkini.

o) **DIGIT KUBAH R2PB**

Alat Kerja Inovasi DIGIT KUBAH R2PB



Digitalisasi Dokumen Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (DIGIT KUBAH R2PB) merupakan sebuah implementasi dan pemanfaatan situs penyimpanan digital yang mana ini sangat berguna agar dokumen-dokumen penting yang ada dapat tersimpan dengan teratur dan rapi. Dan jika seandainya dibutuhkan, bisa di cari kembali tanpa perlu bersusah payah membongkar tempat penyimpanan dokumen fisik.

p) **LOGIS BANA**

Sosialisasi Inovasi LOGIS BANA



Layanan Sosial Psikologis Pasca Bencana (LOGIS BANA) merupakan layanan yang bertujuan untuk mengembalikan individu atau keluarga atau kelompok pasca bencana sehingga menjadi kuat secara individu atau kolektif, berfungsi optimal, memiliki ketangguhan dalam menghadapi masalah, serta menjadi berdaya dan produktif dalam menjalani hidupnya.

3. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah Rp. 20,565,811,977,00 yang berasal dari APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Sebanyak Rp. 14.952.850.841,00 berasal dari dana hibah BNPB yang direalisasikan sebesar Rp.11.158.603.509,00 dan Belanja Operasi sebesar Rp.5,382,961,136,00 yang terealisasi sebesar Rp.549,113,618,00 Realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp.809,217,618,00 atau 3,93 %. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp.20.565.811.977,00
5.1	BELANA OPERASI	Rp.5.382.961.136,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp.15.182.850.841,00

a. Belanja Operasi

Realisasi anggaran belanja operasi terdiri atas gaji dan tunjangan dan kegiatan operasional BPBD yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak Rp.549,113,618 dan terealisasi atau 10,20 %.

b. Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal berasal dari dana hibah BNPB yang di peruntukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi satu item bangunan cekdam sebesar Rp.14.952.850.841,00. Selain itu, terdapat belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp.30.000.000,00 dengan realisasi Rp. 28.400.000 ataun 94,67 %

Adapun Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.47. Realisasi anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.565.811.977,00	16.548.894.741,00	80,47
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.642.549.136,00	4.500.740.886,00	96,95
1	Perencanaan, Peangaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	50.822.000,00	49.885.205,00	98,16
	<i>Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>27.827.000,00</i>	<i>27.015.000</i>	<i>97,08</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>22.995.000</i>	<i>22.870.205</i>	<i>99,45</i>
2	Administrasi Keuangan Daerah	3.144.800.746,00	3.032.826.347,00	96,43
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.025.525.746	2.913.576.347	96,29
	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.275.000	119.250.000	99,97
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.426.000,00	78.054.688,00	91,37
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85.426.000,00	78.054.688,00	91,37
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.297.800	382.797.181	99,35
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>7.461,000</i>	<i>7.284.000</i>	<i>97,62</i>
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>100</i>
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>100</i>
	<i>Fasilitas Kinjungan Tamu</i>	<i>10,000,000</i>	<i>7.770.400</i>	<i>77,4</i>
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>355.336.800</i>	<i>355.242.781</i>	<i>99,18</i>
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	28.400.000	94,66
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	28.400.000	94,66
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.645.590,00	864.108.883,00	77,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.886.610	45,673,580	99,54
	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000	50.932.437	92,60



	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.736.500	24.523.750,00	99,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	745.022.480	742.979.116	99,72
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.557.000	64.668.582,00	85,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.050,000	61.161,582	84,89
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	3,507,000	3.507.000	100
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.923.262.841,00	12.048.153.855,00	75,66
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Per jenis Bencana)	0	0	0
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	253.990.600,00	242.416.725,00	95,44
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	18,988,900	17,733,000	93,39
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Kota	235.001.700	224.683.725	95,61%
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	636.421.400,00	568.372.530,00	89,31
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	289.999.000	221.956.630	76,54
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	327.497.200	327.494.100	100
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota	18.925.200	18.921.800	99,98
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	15.032.850.841	11.237.364.600	74,75
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	15.032.850.841	11.237.364.600	74,75

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pada RPJMD atau Renstra periode tahun 2021-2026 ini terdapat sebuah sasaran strategis yang ditujukan untuk BPBD Kabupaten Padang Pariaman yaitu Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan dengan Indikatornya Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Meningkatnya pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana dengan indikatornya Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pada tahun 2024 sasaran pertama ditargetkan sebesar 55% sedangkan pada sasaran kedua di targetkan sebesar 77%. Untuk capaian pada tahun ke-tiga renstra ini pada adalah pada sasaran pertama sebesar 101% warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sedangkan pada sasaran kedua capaian yang di dapatkan sebesar 100% korban bencana yang mendapatkan layanan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan begitu BPBD Kabupaten Padang Pariaman dapat dinterpestasikan berhasil dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan anggaran yang terbatas.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta satuan

tugas yang ada di BPBD, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang tangguh, tanggap dan tangkas juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2024 ini.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan informasi kebencanaan melalui penambahan media informasi bencana
- 2) Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin untuk merealisasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

Akhir kata, kami beserta segenap aparaturnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Padang Pariaman, masyarakat Padang Pariaman maupun kepada stakeholders yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Limpato, 02 Januari 2025

Plt.KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



EL ABDES MARSYAM, ST, MM
NIP. 19701219 199803 1 004